

Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Berperspektif Masyarakat Perbatasan Bagi Guru di SDN Metamauk

Fadil Mas'ud^{1*}, Meryana Micselen Doko², Daud Yefkanus Nassa³, Dorkas Yufice Ariyanti Kale⁴

¹⁻⁴Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto, Penfui, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

E-mail: fadil.masud@staf.undana.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7261>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 June 2026

Revised: 29 June 2026

Accepted: 18 July 2026

Kata Kunci:

Modul Ajar, Masyarakat Perbatasan, Pendidikan Kewarganegaraan, Kearifan Lokal, Kompetensi Guru

Keywords:

Teaching Modules, Border Communities, Civic Education, Local Wisdom, Teacher Competence



ABSTRACT

Pendidikan di wilayah perbatasan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis dan nasionalisme. Namun, keterbatasan kompetensi guru dan penggunaan perangkat ajar yang kurang kontekstual masih menjadi kendala di SDN Metamauk, Kabupaten Malaka. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini bertujuan meningkatkan kompetensi pedagogis guru dalam menyusun modul ajar berbasis masyarakat perbatasan yang mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. Program dilaksanakan melalui sosialisasi, lokakarya, dan pendampingan intensif secara luring dan daring. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test, post-test, dan penilaian draf modul. Hasil menunjukkan peningkatan kompetensi 80% guru, sementara lebih dari 75% peserta berhasil menyusun modul kontekstual yang memuat budaya lokal dan isu perbatasan. Program juga meningkatkan kepercayaan diri guru dalam menerapkan pembelajaran yang lebih inovatif. Dengan demikian, kegiatan ini efektif memperkuat kemandirian guru dalam mengembangkan perangkat ajar yang mendukung pembentukan identitas kebangsaan generasi muda di wilayah perbatasan.

Education in border areas plays a crucial role in fostering critical awareness and nationalism. However, limited teacher competency and the use of less contextual teaching materials remain obstacles at Metamauk Elementary School in Malaka Regency. The Community Partnership Program (PKM) aims to improve teachers' pedagogical competence in developing border community-based teaching modules that integrate local wisdom and Pancasila values. The program was implemented through outreach, workshops, and intensive offline and online mentoring. Evaluation used pre-tests, post-tests, and module draft assessments. Results showed an increase in competency for 80% of teachers, while more than 75% of participants successfully developed contextual modules that incorporate local culture and border issues. The program also increased teachers' confidence in implementing more innovative learning. Thus, this activity effectively strengthened teachers' independence in developing teaching materials that support the formation of national identity among the younger generation in border areas.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Fadil Mas'ud, et al (2026). Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Berperspektif Masyarakat Perbatasan Bagi Guru di SDN Metamauk, 5(1) 1395-1401. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7261>

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan negara memegang peranan geopolitis yang sangat krusial dalam menjaga kedaulatan serta memperkuat identitas nasional kebangsaan. Sebagai berdana depan negara, pendidikan di kawasan perbatasan semestinya tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk menanamkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Penguatan aspek ini menjadi urgensi kolektif demi membentengi masyarakat dari berbagai pengaruh budaya asing yang rentan mengikis identitas kebangsaan di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, pengarusutamaan

wawasan kebangsaan dalam sistem pendidikan perbatasan menjadi pilar utama dalam mempertahankan integrasi nasional dan kedaulatan negara (Sysoieva, 2024; W. Wahyudi et al., 2020).

Realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan dalam mutu pendidikan di wilayah terluar ini, seperti yang terjadi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Berdasarkan laporan berkala, peringkat pendidikan di Kabupaten Malaka menempati posisi terendah di Provinsi NTT (Atolan, 2025), yang mendanakan perlunya intervensi khusus untuk mencapai standar mutu yang baik. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan fasilitas pendidikan yang sering kali ditemukan dalam kondisi kurang baik. Rendahnya mutu pendidikan di wilayah perbatasan ini sejalan dengan kajian global yang menyoroti ketimpangan struktural dan aksesibilitas pendidikan di area marginal (Roulston et al., 2024).

Kualitas pendidikan di sekolah pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh kompetensi dan kualifikasi profesional guru yang mengajar di kelas. Di Kabupaten Malaka, terdapat banyak pendidik yang belum memiliki kualifikasi serta kompetensi yang sesuai, sehingga berdampak langsung pada rendahnya mutu pengajaran, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Tantangan instruksional ini semakin diperberat oleh tingginya rasio murid-guru yang membuat proses belajar mengajar berjalan kurang efektif. Fenomena keterbatasan kapasitas guru di wilayah terluar ini menuntut adanya stimulus pelatihan berkelanjutan demi meningkatkan kapabilitas adaptif mereka (Sutomo & Siregar, 2022).

Sebagai salah satu sekolah yang berada di garda terdepan Indonesia dan berbatasan langsung dengan Timor Leste, SDN Metamauk menghadapi kerentanan ideologis yang nyata. Berdasarkan hasil observasi pra-kegiatan, para guru kelas di sekolah tersebut belum mengarusutamakan isu-isu perbatasan ke dalam proses pembelajaran. Akibatnya, muncul degradasi sikap nasionalisme warga negara di perbatasan yang tecermin dari pandangan pragmatis masyarakat setempat, seperti slogan "Garuda di dadaku, Dollar di perutku". Jika anggapan transaksional seperti ini dibiarkan tanpa adanya perhatian khusus dalam kurikulum sekolah, maka rasa cinta tanah air generasi muda di wilayah perbatasan akan terkikis secara perlahan.

Salah satu akar permasalahan utama yang menghambat efektivitas penguatan karakter ini adalah perangkat pembelajaran yang digunakan saat ini masih bersifat generik. Modul ajar yang tersedia sering kali tidak relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat perbatasan, serta belum mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Malaka ke dalam kurikulum. Ketidakrelevanan materi ini menyebabkan para siswa mengalami kesulitan besar dalam memahami materi secara kontekstual, sehingga pembelajaran kurang efektif dalam membangun karakter mereka. Penggunaan perangkat pembelajaran konvensional tanpa penyesuaian lokal terbukti gagal membangun retensi dan kesadaran kritis siswa di wilayah khusus (A. B. E. Wahyudi et al., 2025).

Kondisi krisis perangkat ajar tersebut semakin diperparah oleh rendahnya dukungan untuk pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan di Kabupaten Malaka, khususnya di SDN Metamauk. Pelatihan profesional bagi pendidik di daerah ini masih sangat minim karena pemerintah daerah belum sepenuhnya memberikan perhatian khusus pada peningkatan kompetensi secara intensif. Akibat dari minimnya stimulus pelatihan ini, banyak guru akhirnya mengalami hambatan teknis untuk mengembangkan metode pengajaran yang kreatif, interaktif, dan inovatif. Padahal, adaptasi kurikulum berbasis wilayah membutuhkan bimbingan teknis yang terstruktur agar guru mampu bertindak sebagai agen transformasi sosial (Alifah et al., 2024).

Merespons kebutuhan spesifik tersebut, program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang untuk memberikan solusi konkret melalui kegiatan pelatihan penyusunan modul ajar dan pendampingan berkelanjutan bagi guru di SDN Metamauk. Melalui program ini, para guru dilatih untuk menyusun modul pembelajaran mandiri yang mampu mengangkat kearifan lokal masyarakat Malaka sekaligus menanamkan nilai-nilai Pancasila secara aplikatif. Selain itu, diperkenalkan pula metode pengajaran inovatif seperti Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) serta pemanfaatan media berbasis teknologi. Skema ini dilengkapi dengan pendampingan pasca-pelatihan melalui monitoring, evaluasi, serta sesi diskusi dan refleksi guna mengatasi kendala teknis maupun konseptual guru selama implementasi.

Melalui rangkaian intervensi ini, program PKM menargetkan minimal 80% peserta mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun modul ajar berperspektif masyarakat perbatasan yang dibuktikan melalui pre-test dan post-test. Hasil penelitian terdahulu mengonfirmasi

bahwa pendidikan Pancasila memiliki peran vital dalam membangun nasionalisme dan mengurangi potensi konflik sosial-politik di kawasan perbatasan. Dengan modul yang kontekstual, siswa dapat lebih memahami identitas nasional mereka sebagai warga negara Indonesia dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial. Secara makro, peningkatan kualitas pendidikan melalui program ini diharapkan berkontribusi pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat, meningkatkan angka melek huruf, serta membawa Kabupaten Malaka keluar dari zona merah Pendidikan.

METODE

Metode pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang secara sistematis, komprehensif, dan kolaboratif guna mengatasi permasalahan instruksional serta pemenuhan perangkat pembelajaran kontekstual di SDN Metamauk, Kabupaten Malaka. Pendekatan yang diterapkan mengombinasikan metode edukatif, partisipatif, dan pendampingan klinis berkelanjutan (continuous coaching) untuk memastikan terjadinya alih pengetahuan (knowledge transfer) dan keterampilan secara optimal. Sasaran utama atau khalayak sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah para pendidik yang merupakan guru kelas di lembaga mitra tersebut. Secara operasional, tahapan pelaksanaan pengabdian ini dibagi ke dalam tiga fase utama yang saling berkesinambungan, yaitu tahap pra-kegiatan, tahap pelaksanaan kegiatan, serta tahap monitoring dan evaluasi.

Tahap pra-kegiatan berfokus pada penguatan konsolidasi internal dan eksternal bersama pihak mitra demi membangun kesepahaman bersama. Langkah awal yang dilakukan adalah sosialisasi program kepada otoritas sekolah di SDN Metamauk untuk menyamakan persepsi mengenai esensi, tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta komitmen keberlanjutan program di masa depan. Selanjutnya, dilakukan identifikasi peserta bersama Kepala Sekolah guna memastikan keterlibatan aktif seluruh guru kelas sebagai target penerima manfaat. Pada fase persiapan ini pula, tim pengusul bersama mitra menyepakati alokasi waktu dan jadwal pelaksanaan, membentuk kepanitiaan lokal untuk kelancaran teknis di lapangan, serta melakukan koordinasi intensif dengan narasumber eksternal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka untuk menyelaraskan substansi pelatihan dengan arah kebijakan pendidikan daerah.

Tahap pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari intervensi PKM yang diwujudkan melalui dua bentuk aktivitas utama, yaitu pelatihan teoretis-metodologis dan pendampingan praktis. Kegiatan diawali dengan pelatihan penyusunan modul ajar berperspektif masyarakat perbatasan yang difasilitasi oleh Tim PKM bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Dalam sesi pelatihan ini, para guru dibekali dengan keterampilan metodologis mengenai teknik penyusunan modul yang berbasis pada karakteristik siswa, integrasi nilai-nilai kearifan lokal budaya Malaka, serta pengarusutamaan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan secara aplikatif. Guna mendorong terciptanya ekosistem kelas yang inovatif, tim juga memperkenalkan metode pengajaran interaktif seperti Pembelajaran Berbasis Proyek (Project-Based Learning) serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi informasi. Pelatihan ini kemudian ditindaklanjuti secara konkret melalui program pendampingan (coaching clinic) dan sesi diskusi terpumpun, di mana tim memberikan bimbingan langsung kepada guru dalam mematangkan dan memvalidasi draf modul ajar berperspektif perbatasan yang tengah mereka susun.

Tahap monitoring dan evaluasi (Monev) diterapkan secara ketat dan terstruktur untuk mengukur tingkat keberhasilan, ketercapaian target luaran, serta efektivitas program pengabdian. Evaluasi proses dilakukan melalui pendekatan kuantitatif berupa metode pre-test dan post-test menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan sebelum pelatihan dimulai dan setelah seluruh rangkaian pendampingan selesai. Instrumen pengukuran ini dirancang khusus untuk menilai tingkat pemahaman guru yang mencakup lima aspek utama, yaitu: (1) pemahaman peran masyarakat perbatasan, (2) internalisasi nilai kearifan lokal, (3) kemampuan teknis penyusunan modul, (4) penguasaan nilai-nilai karakter, dan (5) penguasaan metode pembelajaran efektif. Hasil penilaian ini diklasifikasikan ke dalam empat parameter ukur, yakni nilai 0,00–2,50 (Tidak Paham), 2,51–5,00 (Kurang Paham), 5,01–7,50 (Cukup Paham), dan 7,51–10,00 (Sangat Paham). Selain evaluasi kognitif, dilakukan pula field monitoring berbasis kemitraan dengan melibatkan kepala sekolah untuk memantau performa alumni pelatihan dalam memproduksi dan mengimplementasikan modul tersebut secara berkelanjutan di ruang kelas. Seluruh rangkaian Monev ini ditutup dengan final evaluation berupa survei kuantitatif untuk mengukur persepsi, ketercapaian target minimal peningkatan kapasitas guru sebesar 80%, serta dampak makro kegiatan terhadap kualitas instruksional sekolah.

Guna menjamin keberlanjutan program jangka panjang (*sustainability*) setelah masa pengabdian formal berakhir, tim pengusul menerapkan strategi digital berupa pembentukan WhatsApp group yang berfungsi sebagai ruang konsultasi, diskusi, dan bimbingan asinkronus bagi guru dalam menghadapi kendala teknis maupun konseptual. Pihak mitra, SDN Metamauk, ditempatkan sebagai subjek aktif yang memegang peran sentral sebagai panitia lokal sekaligus pengendali mutu internal yang bertugas melakukan pengawasan berkala terhadap implementasi kurikulum berbasis perbatasan ini. Terakhir, integrasi dukungan dan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka dipertahankan secara strategis sebagai upaya jaminan regulasi agar perangkat modul ajar yang telah dihasilkan dapat diadopsi, dikembangkan, dan direplikasi oleh sekolah-sekolah lain di wilayah perbatasan Malaka secara lebih luas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) bertajuk "Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Berperspektif Masyarakat Perbatasan bagi Guru di SDN Metamauk" telah berhasil dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kompetensi guru. Kegiatan ini didesain secara adaptif guna memfasilitasi para guru kelas di SDN Metamauk, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berada di wilayah tapal batas. Dalam perspektif kajian kewarganegaraan, rekonstruksi perangkat ajar di wilayah perbatasan membutuhkan pendekatan *Border Pedagogy* (*Pedagogi Perbatasan*) yang diartikan sebagai upaya pendidikan untuk mengonseptualisasikan ulang batasan geografis menjadi ruang penguatan kesadaran kritis dan nasionalisme siswa (Ferdiansyah et al., 2023; Wallace, 2020). Melalui program ini, pendidik tidak hanya dilatih secara teknis melainkan didorong untuk memproduksi modul yang mampu mengintegrasikan isu kebangsaan dan nilai Pancasila.

Pelaksanaan PKM ini diawali dengan tahap sosialisasi kepada kepala sekolah dan guru-guru di SDN Metamauk. Sesi sosialisasi ini memegang peranan krusial untuk membangun pemahaman bersama mengenai tujuan, metode, serta luaran kegiatan yang ditargetkan. Respons sangat positif ditunjukkan oleh pihak sekolah mitra yang menyatakan dukungan penuh serta menyediakan fasilitas ruang dan waktu selama pelaksanaan kegiatan. Melalui lensa teori *Komunitarianisme* (*Communitarianism*) dalam kajian kewarganegaraan, penerimaan serta dukungan administratif dari otoritas sekolah ini mencerminkan adanya kesadaran moral bersama akan tanggung jawab sipil (*civic responsibility*) untuk memajukan kualitas komunitasnya (Böhm, 2023). Penguatan ikatan solidaritas lokal ini menjadi modal sosial penting dalam menggerakkan kesadaran bela negara yang diinisiasi dari institusi pendidikan formal.

Tahap selanjutnya diwujudkan dalam bentuk pelatihan penyusunan modul ajar yang menasar seluruh guru kelas di SDN Metamauk sebagai peserta utama sekaligus kolaborator kegiatan. Pelaksanaan pelatihan ini juga dijalankan secara sinergis melalui koordinasi agenda bersama pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. Ditinjau dari konsep *Civic Literacy* (*Melek Kewarganegaraan*), kemitraan sistemik ini merupakan langkah strategis untuk membekali para pendidik dengan pengetahuan fundamental mengenai hak, kewajiban, dan tata kelola sosiopolitik wilayahnya (Nasrullah, 2023). Guru diposisikan bukan hanya sebagai pengajar materi kurikulum umum, melainkan sebagai agen literasi sipil yang memiliki kapasitas intelektual untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan secara terstruktur kepada generasi muda di perbatasan.

Dalam sesi pelatihan tersebut, materi yang dibedah meliputi konsep pembelajaran kontekstual di daerah perbatasan, integrasi nilai-nilai Pancasila, serta teknik menyusun modul berbasis kearifan lokal. Pendekatan *andragogi* yang diterapkan mengombinasikan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, hingga praktik langsung menyusun draf modul secara mandiri. Analisis sosiologi kewarganegaraan menilai materi-materi tersebut sebagai instrumen penanaman *Civic Virtue* (*Kebajikan Warganegara*) secara terencana melalui transformasi kurikulum (Lickona, 2004; Wallace, 2020). Pengarusutamaan asas Pancasila ke dalam modul pembelajaran berfungsi mengubah prinsip-prinsip negara yang abstrak menjadi watak sipil (*civic disposition*) yang mewujudkan dalam perilaku keseharian siswa (Manning & Edwards, 2024).

Kegiatan lokakarya teoretis tersebut segera ditindaklanjuti secara konkret melalui program pendampingan (*coaching clinic*) bagi para guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Proses pendampingan ini dilaksanakan menggunakan skema bauran, yakni melalui pertemuan tatap muka secara langsung di sekolah maupun komunikasi daring via grup WhatsApp. Ditinjau dari teori *Deliberative Civic Engagement* (*Keterlibatan Sipil Deliberatif*), ruang komunikasi bauran ini bertindak sebagai ruang publik mini yang inklusif bagi guru dan tim PKM untuk berkolaborasi, merevisi, dan

merefleksikan konteks sosiokultural daerah perbatasan (Chiu, 2021). Proses bimbingan dua arah ini memicu partisipasi aktif guru, di mana mereka bertindak sebagai subjek deliberatif yang ikut merumuskan solusi atas hambatan pengajaran nilai kebangsaan di daerahnya.

Hasil nyata dari fase pendampingan kolaboratif ini ditunjukkan dengan keberhasilan setiap guru kelas dalam menghasilkan draf produk modul ajar berperspektif masyarakat perbatasan. Beberapa modul yang disusun secara autentik tersebut telah memuat integrasi kearifan lokal yang sangat kental, seperti cerita rakyat Malaka, visualisasi nilai gotong royong, serta contoh nyata isu nasionalisme di perbatasan. Berdasarkan konsep Cultural Citizenship (Kewarganegaraan Kultural), pengakuan dan peleburan tradisi lokal ke dalam pendidikan formal merupakan bentuk apresiasi terhadap hak budaya masyarakat marginal (A. B. E. Wahyudi et al., 2025). Langkah ini membuktikan bahwa penguatan nasionalisme di tapal batas tidak harus menafikan tradisi lokal, melainkan dapat diperkokoh oleh nilai sosiokultural daerah sebagai pilar penopang identitas kebangsaan yang inklusif.

Evaluasi terhadap aspek kognitif menunjukkan tingkat efektivitas program yang sangat memuaskan, di mana minimal 80% peserta pelatihan mengalami peningkatan skor pemahaman yang signifikan. Guru memperoleh peningkatan pengetahuan yang konsisten diukur dari perbandingan rata-rata skor pada sesi pre-test dan post-test. Dalam khazanah pendidikan kewarganegaraan, lompatan capaian kuantitatif ini merepresentasikan penguatan dimensi Civic Knowledge (Pengetahuan Warga Negara) (Hoskins & Janmaat, 2019; Wallace, 2020). Pendidik yang awalnya menghadapi tantangan keterbatasan kualifikasi kini telah dibekali dengan kapasitas intelektual dan pengetahuan kewarganegaraan yang memadai untuk mentransfer esensi nilai kebangsaan kepada para peserta didiknya secara terukur.

Monitoring dan evaluasi awal dilakukan secara terstruktur melalui penilaian terhadap pemahaman guru terkait peran masyarakat perbatasan, nilai kearifan lokal, metode pembelajaran, dan teknik penyusunan modul. Hasil instrumen monitoring menunjukkan bahwa lebih dari 75% peserta sudah memiliki kemampuan mumpuni dalam menyusun kerangka modul yang sesuai dengan karakteristik masyarakat perbatasan. Analisis terhadap indikator keberhasilan ini mengacu pada pemenuhan komponen Civic Skills (Keterampilan Warga Negara), khususnya dalam dimensi keterampilan intelektual dan partisipatif (Lalonde, 2020). Keterampilan menyusun rancangan pembelajaran kontekstual ini menandakan guru telah memiliki kecakapan sipil untuk memilah, menyaring, dan mengemas realitas sosial di sekitar mereka menjadi materi ajar yang bermakna.

Di samping perubahan pada aspek teoretis dan praktis, program pengabdian ini memberikan dampak psikologis positif berupa meningkatnya kepercayaan diri guru dalam mengembangkan pembelajaran kontekstual. Pendidik mulai memberanikan diri mengintegrasikan isu-isu perbatasan nasional secara aplikatif ke dalam proses pembelajaran sehari-hari di ruang kelas. Penyesuaian paradigma instruksional ini memegang peranan krusial dalam menumbuhkan efikasi diri sipil guru sebagai pembentuk Civic Disposition (Watak Kewarganegaraan) siswa yang tangguh (Suyato et al., 2022). Kepercayaan diri yang tinggi mendorong guru bertindak sebagai aktor utama yang membentengi siswa dari kerentanan ideologis serta mengikis sikap pragmatisme transaksional yang kerap muncul di area marginal.

Keberhasilan capaian pengabdian ini sekaligus memperkuat urgensi teoretis mengenai pentingnya pendidikan karakter, bela negara, serta nilai-nilai Pancasila yang dikontekstualisasikan bagi masyarakat di wilayah terluar. Penanaman nilai kebangsaan yang berakar pada sosiokultural terbukti efektif memupuk rasa cinta tanah air serta meminimalisasi potensi alienasi politik masyarakat di perbatasan antarnegara. Integrasi materi lokal ini bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan loyalitas kultural kedaerahan dengan loyalitas politik nasional (A. B. E. Wahyudi et al., 2025), sehingga melahirkan generasi muda yang tidak hanya bangga akan identitas budayanya tetapi juga memiliki kepatuhan dan kesetiaan mutlak terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun mencatatkan banyak hasil positif, implementasi program PKM ini menghadapi sejumlah kendala struktural dan hambatan teknis yang nyata di lapangan. Tantangan utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sarana prasarana sekolah seperti jaringan internet yang tidak stabil, minimnya laptop, terbatasnya bahan ajar digital, benturan alokasi waktu mengajar rutin guru, variasi kemampuan awal, kesulitan mengintegrasikan isu perbatasan secara aplikatif, penyesuaian jadwal koordinasi, hingga resistensi akibat kebiasaan mengajar konvensional menggunakan metode ceramah. Dari sudut pandang kajian kewarganegaraan, krisis ini merefleksikan adanya tantangan Civic Justice (Keadilan Sipil) dalam hal pemenuhan hak akses pendidikan bermutu di wilayah pinggiran, yang pada

akhirnya menuntut munculnya Civic Resilience (Ketahanan Sipil) yang luar biasa dari para pendidik untuk tetap mengabdikan melampaui keterbatasan fasilitas (Murtiningsih & Wijaya, 2024).

Sebagai solusi jangka panjang, rencana tindak lanjut (RTL) yang komprehensif telah diformulasikan bersama pihak mitra guna menjamin keberlanjutan program secara mandiri. Agenda operasional ke depan mencakup pendampingan lanjutan penyempurnaan draf, pelaksanaan uji coba implementasi modul di kelas masing-masing guna mengamati efektivitasnya, pelaksanaan forum refleksi bersama, pembentukan kelompok guru pengembang modul internal di SDN Metamauk, optimalisasi grup WhatsApp, serta perluasan kerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka untuk mereplikasi program di sekolah perbatasan lainnya. Komitmen keberlanjutan ini mencerminkan penguatan aspek Civic Association (Asosiasi Sipil), di mana para tenaga pendidik bertransformasi menjadi komunitas warga negara aktif (active citizens) yang berdaya, mandiri, dan berjejaring dalam mengawal keberlangsungan pendidikan karakter bangsa di beranda depan negara (Hoskins & Janmaat, 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) "Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Modul Ajar Berperspektif Masyarakat Perbatasan bagi Guru di SDN Metamauk", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut: 1) Peningkatan Kompetensi Pedagogis dan Kebijakan Kurikulum: Kegiatan PKM ini telah berhasil dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang terencana, mulai dari sosialisasi, lokakarya pelatihan, hingga pendampingan intensif (coaching clinic) berbasis bauran (tatap muka dan daring via WhatsApp). Pelaksanaan program ini terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi serta keterampilan teknis guru kelas di SDN Metamauk dalam menyusun perangkat pembelajaran yang mandiri, adaptif, dan selaras dengan regulasi Kurikulum Merdeka serta kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka. 2) Kontekstualisasi Isu Kebangsaan dan Kearifan Lokal: Melalui pendekatan Border Pedagogy (Pedagogi Perbatasan) dan prinsip konstruktivisme, program ini berhasil mengarahkan guru untuk memproduksi draf modul ajar yang tidak lagi bersifat generik, melainkan kaya akan muatan sosiokultural lokal (seperti cerita rakyat Malaka dan nilai gotong royong) serta isu-isu geopolitik perbatasan nasional. Integrasi ini menjadi instrumen penting untuk menumbuhkan Civic Disposition (watak kewarganegaraan) siswa, memperkuat literasi sipil (civic literacy), serta membentengi generasi muda di tapal batas dari kerentanan ideologis melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila secara aplikatif. 3) Capaian Indikator Keberhasilan dan Keberlanjutan Program: Evaluasi program menunjukkan hasil kuantitatif yang sangat memuaskan, di mana lebih dari 80% peserta mengalami peningkatan nyata pada aspek Civic Knowledge (pengetahuan warga negara) berdasarkan nilai pre-test dan post-test, serta lebih dari 75% peserta telah menguasai indikator Civic Skills (keterampilan warga negara) dalam mendesain modul yang kontekstual. Meskipun dihadapkan pada kendala struktural berupa keterbatasan sarana prasarana digital dan penyesuaian waktu, program ini tetap menumbuhkan efikasi diri (self-efficacy) guru. Keberlanjutan program ini dijamin melalui perumusan Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang terstruktur, pembentukan kelompok guru pengembang modul internal, serta koordinasi replikasi program bersama pemerintah daerah guna memperluas dampak positifnya di sekolah-sekolah wilayah perbatasan lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan pengabdian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Alifah, H. N., Utami, S., & Inayah, L. (2024). Teacher Welfare Management and Its Implications for Improving Students' Numeracy Literacy in Indonesia: Literature Review. *International Journal of Educational Research*. <https://doi.org/10.62951/ijer.v1i3.359>
- Atolan, B. (2025). Rapor Pendidikan Malaka Terendah di Provinsi NTT !! Tahun 2025 Kabupaten Malaka Harus Berjuang Keluar Dari Zona Merah Pendidikan!! (Catatan Pinggir Boni Atolan, Wartawan, Tinggal di Malaka). Radar Malaka. <https://radarmalaka.com/rapor-pendidikan-malaka-terendah-di-provinsi-ntt-tahun-2025-kabupaten-malaka-harus-berjuang-keluar-dari->

- zona-merah-pendidikan-catatan-pinggir-boni-atolan-wartawan-tinggal-di-malaka/
- Böhm, H. (2023). Five Roles of Cross-border Cooperation Against Re-bordering. *Journal of Borderlands Studies*, 38(3), 487–506. <https://doi.org/10.1080/08865655.2021.1948900>
- Chiu, T. K. F. (2021). Digital support for student engagement in blended learning based on self-determination theory. *Computers in Human Behavior*, 124, 106909. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106909>
- Ferdiansyah, M. F., Timur, F. G. C., & Sumarno, A. P. (2023). Pancasila And Citizenship Education For Border Communities And Indonesia's Outermost Regions. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 13(2), 78–84. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v13i2.17246>
- Hoskins, B., & Janmaat, J. G. (2019). Education, Democracy and Inequality: Political Engagement and Citizenship Education in Europe. Palgrave Macmillan.
- Lalonde, C. (2020). Civic Resilience and the Ethics of Citizenship in Uncertain Times. *Journal of Civic Studies*, 5(2), 45–59.
- Lickona, T. (2004). Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgment, Integrity, and Other Essential Virtues. Simon and Schuster.
- Murtiningsih, I., & Wijaya, A. P. (2024). Keterlibatan warga negara (civic engagement) dalam penguatan profil pelajar Pancasila. *Civic Education And Social Science Journal (CESSJ)*, 6(1), 89–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5582>
- Nasrullah, R. (2023). Literasi Digital dan Civic Engagement di Era Media Baru. Simbiosis Rekatama Media.
- Roulston, S., Bates, J., McAuley, C., O'Connor-Bones, U., Murtagh, S., & Cook, S. (2024). Education along border regions in Ireland: Challenges and opportunities. *International Journal of Educational Research*, 128, 102472. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijer.2024.102472>
- Sutomo, M., & Siregar, E. (2022). Teacher Professional Development in Indonesia's Remote Areas with Driven Educational Philanthropic Institutions. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6, 500–509. <https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55742>
- Suyato, Sapriya, & Budimansyah, D. (2022). Civic disposition dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19(2), 173–184.
- Sysoieva, S. (2024). Pedagogy of borderlands in the scientific-educational discourse of the republic of poland. *Continuing Professional Education: Theory and Practice*, 78(1), 88–98. <https://doi.org/10.28925/1609-8595.2024.1.7>
- Wahyudi, A. B. E., Salimi, Moh., Hidayah, R., Surya, A., Suhartono, S., & Wahyono, W. (2025). Local wisdom-based science e-module to improve cultural literacy and critical thinking skills of elementary school students. *Journal of Environment and Sustainability Education*, 3(3), 387–395. <https://doi.org/10.62672/joease.v3i3.91>
- Wahyudi, W., Affandi, I., Darmawan, C., Tippe, S., Nursnaeny, P., & Dewantara, J. (2020). Community Civic Education In The Indonesian Border Areas (Study In The Central Sebatik District, North Kalimantan Province). *Jurnal Pertahanan: Media Informasi Ttg Kajian & Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity, Nasionalism & Integrity*, 6, 472. <https://doi.org/10.33172/jp.v6i3.797>
- Wallace, D. (2020). Identifying with Borders and Boundaries: The Place of Critical Pedagogy as Social Responsibility Education. In E. Sengupta, P. Blessinger, & C. Mahoney (Eds.), *University–Community Partnerships for Promoting Social Responsibility in Higher Education*. Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S2055-364120200000023010>